

## Berita Lingkungan Hidup

### RPP Minerba Belum Sinkron dengan Tata Ruang Wilayah

JAKARTA--Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU No 4/2009 soal Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) belum sinkron dengan tata ruang wilayah. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu mengungkapkan, RPP tersebut hingga kini belum bisa menjamin adanya tumpang tindih lahan dengan perencanaan tata ruang dan peruntukan wilayah.

"Belum sinkron baik untuk kehutanan, lingkungan hidup, maupun pertambangan," kata Bob usai acara seminar setengah hari tentang RPP di Departemen ESDM, Selasa (4/8).

Bob menganjurkan hal ini perlu disinkronkan mengingat investor membutuhkan kejelasan dan keamanan investasi pertambangan. "Oleh karena itu, pengusaha dan pemerintah daerah perlu bersabar hingga masalah peruntukkan lahan itu bisa tuntas dan sinkron," jelasnya.

Ditambahkan Bob, pemerintah juga perlu menjelaskan masalah penyesuaian kontrak dan luas lahan secara detail. "Masih banyak investor pertambangan yang kebingungan dan

mempertanyakan masalah penyesuaian kontrak dan penyusutan luas lahan," tegasnya..

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Pertambangan dan Bahan Galian Industri Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Juangga Mangasi menilai bahwa RPP tersebut seharusnya sudah lebih spesifik. Beberapa ketentuan dalam RPP itu perlu diperjelas. "Terutama soal pasal penyesuaian, penyusutan luas area pertambangan, dan tumpang tindih lahan," ujarnya. "Pemerintah perlu berkoordinasi lagi dengan pihak di sektor pertambangan."

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerba) Departemen ESDM Witoro Soelarno menyatakan pihaknya berupaya proaktif untuk mensinkronkan rencana tata ruang, peruntukan lahan di Departemen Kehutanan, dan Lingkungan Hidup dengan wilayah pertambangan. "Sinkronisasi memang perlu supaya mencegah konflik peruntukan lahan di kemudian hari. Sehingga sebelum interdep, masalah tumpang tindih lahan itu harus sudah tuntas," tegasnya